

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya, dokumen Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Dearah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022. Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022. Selain itu, melalui reuiu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi terkini dan tingkat capaian kinerja serta strategi pada setiap unit kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis yang disertai dengan kejelasan dan hasil dari program/kegiatan yang direncanakan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022.

Demikian Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 ini disusun, semoga segala program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bengkalis, 7 Juni 2022

INSPEKTUR DAERAH,



H. RADIUS AKIMA, S.SOS, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710522 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022.....	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	14
BAB IV PENUTUP.....	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pelaksanaan otonomi kepada daerah secara luas dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian otonomi daerah memungkinkan daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Termasuk didalamnya penataan perangkat daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi daerah guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

Kabupaten Bengkalis adalah satu diantara 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berdiri sejak tahun 1956 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan luas wilayah 8.402,43 km² yang merupakan sisa pemekaran setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Secara administratif Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan yang letaknya terpecah di 3 (tiga) buah pulau besar yaitu Pulau Sumatera, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rupat.

Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibidang pengawasan, perlu memfokuskan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera"**.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis berperan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan otonomi daerah sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku stakeholders utama.

Untuk itu diperlukan pengawasan yang terus menerus guna menjaga agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana, menurut aturan yang ditentukan dan dilaksanakan dengan penuh disiplin oleh mereka yang bertanggungjawab. Pengawasan yang dilakukan dengan efektif dan efisien dapat mencegah terjadinya pemborosan penggunaan keuangan daerah, serta menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan juga merusak citra wibawa pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum sebagai dasar Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatab Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis ;
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Bengkalis Nomor 050/Bappeda-PPE/38/2022 tentang Penyampaian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Perangkat Daerah Tahun 2022.

Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas antara lain :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dibidang pengawasan, Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut :

- a) Inspektur Daerah;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - (a) Subbagian Analisa dan Evaluasi ;
 - (b) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan ;
 - (c) Kelompok Jabatan Fungsional;
- c) Inspektur Pembantu I, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor ;
- d) Inspektur Pembantu II, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
- e) Inspektur Pembantu III. terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
- f) Inspektur Pembantu IV. terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
- g) Inspektur Pembantu V. terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Perubahan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan sarana bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, guna merealisasikan target sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Bengkalis.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Ini, diharapkan dapat terjadi sinkronisasi rencana kerja lintas sektoral antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta aparat Pengawas Internal maupun dari Eksternal dengan harapan adanya koordinasi yang instensif, sehingga pelaksanaan program maupun kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan efektif dan efisien;

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Perubahan ini diharapkan dapat terjadi sinkronisasi rencana lintas sektoral antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan institusi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, sedangkan dari sistem pembiayaan yang secara langsung digunakan untuk operasional kegiatan;

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui Program dan Kegiatan yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun perubahan (DPPA).

Pada Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan dana sebesar **Rp.19.251.388.301,-** yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar **Rp. 7.959.308.328,-** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp.10.454.084.973,-** yang dipergunakan untuk melaksanakan 3 program yang terdiri atas 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 telah terjadi pergeseran Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis namun pergeseran tersebut tidak merubah pagu awal.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis s/d Triwulan I Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

No	Bentuk RALP	KODE	Uraian Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Hasil/Anggaran Berwujud)	Target RENCANA Pembangunan Daerah Pada Tahun 2022 (dalam persen RENCANA)	Pembacaan Capaian Kinerja RENCANA yang di dengan RENCANA Pelaksanaan Daerah Tahun Lalu (n-1)	Target Kinerja di anggaran APBD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang diwujudkan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Pembacaan Capaian Anggaran RALP yang diwujudkan	Pembacaan Kinerja dan Anggaran RENCANA s/d Tahun 2022 (Menurut Tahun Pelaksanaan APBD Tahun 2022)	Target Capaian Kinerja dan RENCANA s/d tahun 2022	Pembacaan (Dampak) Persentase				
								I				II								III			
								1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12
		01.2.01.01	Pengembangan Sarung Lili Daerah APBD	Jumlah Sarung Lili yang diproduksi	4%	84 328 000,00		1 360 000,00	0 barang	28 800 000,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	28 800 000,00	28 800 000,00	1,50		
		01.2.01.02	Administrasi Kependudukan						0	148 261 600,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	148 261 600,00	148 261 600,00			
		01.2.01.03	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Tipe dan 7 yang	1. Jumlah Aparat Pengabdian yang Mengikuti Pengembangan Pribadi 2. Jumlah Aparat Pengabdian yang Terwujud	30%	4 321 888 000,00		763 288 000,00	0 orang	34 371 704,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	34 371 704,00	34 371 704,00	1,10		
		01.2.01.04	Selakuhan Penerimaan dan Penyalangan	Jumlah Aparat yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Berjalan dan Penyalangan	80%	704 888 000,00		113 288 000,00	0 orang	11 138 000,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11 138 000,00	11 138 000,00	1,50		
		01.2.01.11	Selakuhan 10 dan 11	Jumlah Aparat yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100%	87 712 000,00		128 428 000,00	0 orang	69 888 000,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	69 888 000,00	69 888 000,00	4,20	8,32	
		01.2.01.05	Administrasi Daerah					0	23 600 000,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	23 600 000,00	23 600 000,00				
		01.2.01.01	Pembinaan Kependudukan	Jumlah Sarung Lili yang diproduksi	80	200 000 000,00		44 423 000,00	0 barang	11 378 000,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11 378 000,00	11 378 000,00	3,20	6,70	
		01.2.01.02	Pembinaan Peningkatan dan Peningkatan	1. Jumlah Aparat Pengabdian 2. Jumlah Aparat Pengabdian	11%	607 788 532,00		128 000 000,00	0 orang	28 428 000,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	28 428 000,00	28 428 000,00	2,10	3,40	
		01.2.01.03	Pembinaan Sektor Listrik	Jumlah Sarung Lili yang diproduksi	11700	613 627 828,00		62 438 000,00	0 barang	16 284 000,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16 284 000,00	16 284 000,00	2,00	4,27	
		01.2.01.04	Pembinaan Sektor Listrik	Jumlah Sarung Lili yang diproduksi	100	800 018 000,00		767 378 000,00	0 barang	23 284 000,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	23 284 000,00	23 284 000,00	3,20	2,30	
		01.2.01.05	Pembinaan Sektor Listrik	Jumlah Sarung Lili yang diproduksi	100	200 000 000,00		88 378 000,00	0 barang	0 000 000,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0 000 000,00	0 000 000,00	4,17	2,11	

No	Sasaran RPMD	KODE	Uraian/ Bidang Uraian Prioritas/ Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Register/ SubDU)	Target RENCRA Perangkat Daerah Tahun 2022 (sifat persis RENCRA)		Rencana Output Kinerja RENCRA sesuai dengan RENCRA Perangkat Daerah Tahun Lalu (1-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPMD Tahun Anggaran (Tahun n-1) yang dianggarkan	Realisasi Kinerja PDB Tahun								Rencana Output Kinerja dan Anggaran RPMD yang dianggarkan	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCRA s/d Tahun 2022 (sifat Tahun Pelaksanaan RPMD Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENCRA s/d Tahun 2022		Peringkat 1 Daerah Peringkat Ungg	
					Tahun 2022		Tahun 2021			2020		2019		2018		2017			2022		2021			
					H	Sp	H	Sp		H	Sp	H	Sp	H	Sp	H	Sp		H	Sp	H	Sp		
		01.7.01.01	Pengembangan Pasar Jasa di Kabupaten BPD	Jumlah Ruang Komersial dan Komersial Kecil dan Daerah	3000 Lokasi R.A.L	4.028.212.000,00			370 Lokasi	788.328.000,00	2019	1.044.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	1.044.481.000,00	21,30	1.044.481.000,00	2,38	2,52		
		01.7.01.01	Devolusi Pelaksanaan Sertifikasi Perumahan Berkualitas (SPK)	Terselenggaranya Sertifikasi Perumahan Berkualitas (SPK)	0 R.A.L	482.179.000,00		1 Aptasia 1	80.000.000,00	0	11.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.470.000,00		11.470.000,00		3,31		
		01.7.01.01	Pengembangan SBB Daerah Penyempurnaan Layanan Perumahan							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		01.7.01.05	Pengembangan Jasa	Jumlah Penyediaan Fasilitas Penyempurnaan Perumahan	70 R.A.L	828.014.000,00		18 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		01.7.01.10	Pengembangan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Sarana Penyempurnaan Perumahan	516 U-R	1.088.882.480,00		0 Unit	124.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		01.7.01.11	Pengembangan Jasa Penyempurnaan Daerah							0	60.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.178.000,00		60.178.000,00				
		01.7.01.01	Pengembangan Jasa Sertifikasi	1. Jumlah Penyempurnaan Sertifikasi Perumahan, 2. Jumlah Tenaga Kerja Legal Adminstrasi Kantor	30 Lokasi R.A.L	823.200.000,00		1800 Berkas, 5 Orang	152.000.000,00	0,00	30.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	30.120.000,00	33,30	30.120.000,00	1,33	1,44		
		01.7.01.02	Pengembangan Jasa Fasilitas Sertifikasi Daya Ri dan Lainnya	Jumlah Indikator Sertifikasi Perumahan	18 Lokasi R.A.L	1.021.461.700,00		12 Berkas	108.828.170,00	0,00	20.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	20.640.000,00	2,30	20.640.000,00	10,07	2,57		
		01.7.01.14	Pengembangan Jasa Penyempurnaan Lainnya	Jumlah Tenaga Kerja Legal	12 Lokasi R.A.L	126.483.000,00		2 Orang	38.480.000,00	0,00	0.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0.000.000,00		0.000.000,00		4,17		
		01.7.01.01	Pengembangan Jasa Perumahan, Bina Perumahan, PBI, dan Fasilitas Lainnya dan Penyempurnaan lainnya	Jumlah Sarana dan Fasilitas Perumahan	36 Lokasi R.A.L	1.738.132.480,00		0 Unit	228.167.000,00	0,00	33.797.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	33.797.570,00	2,30	33.797.570,00	2,70	1,04		

Unit: Rp. Miliar (Rp. 1.000.000.000,00)

No	Kode SKPD	Kode	Uraian/Detail Program/Unit Kerja/Detail Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome/Target)	Target RKPD Tahun 2022	Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Tahun 2022	Target Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2022	Pembelian Kebutuhan Peralengkapan						Rencana Anggaran Kinerja SKPD yang akan dilaksanakan	Rencana Anggaran Kinerja SKPD yang akan dilaksanakan	Target Capaian Kinerja	Perkiraan 1. Diserah Perolehan
								10	11	12	13	14	15				
		2.2.20.20	Pembelian Peralengkapan Kantor	1. Jumlah Peralengkapan Kantor	1.771.874.000,00		1.771.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.20.20	Pembelian Peralengkapan Kantor	1. Jumlah Peralengkapan Kantor	1.771.874.000,00		1.771.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pembelian Kebutuhan Peralengkapan																	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
01			PELAYANAN		11.000.000.000,00		11.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.2.01	PELAYANAN														
		02.2.01.01	Pengembangan Perangkat Lunak	1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi RPJMD Tahun 2022	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.2.01.02	Pembelian Kebutuhan	1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi RPJMD Tahun 2022	2.100.000.000,00		2.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.2.01.03	Revisi Anggaran	1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi RPJMD Tahun 2022	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00 01.000.000.000,00

No.	Sesuai RPJPD	KICD	Uraian tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)	Target RENCANA Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Tahun 2022 (RPJPD 2019-2024)	Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan dengan RENCANA Kinerja Tahun Lalu (2021)	Realisasi Kinerja Pada Tahunan				Norma Capaian Kinerja dan Anggaran AP/MD yang tersedia	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA dan Tahunan 2022 (RPJPD 2019-2024)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RENCANA dan Tahunan 2022	Peringkat Capaian Kinerja
							1	2	3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
012.01.01			Pembinaan Asas-asas dan Prinsip-prinsip	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Subasas dan Prinsip-prinsip	1	1	100%	100%	0	0	0	100%	100%	
012.01.02			Standarisasi Mutu dan Proses serta Standar Pelayanan dan Peningkatan Kualitas Layanan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan URAH 2. Urutan Laporan Hasil Monitoring dan Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Mutu 3. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Peningkatan Mutu	24	24	100%	100%	0	0	0	100%	100%	
012.01.03			Pembinaan Asas-asas dan Prinsip-prinsip	Jumlah Laporan Hasil Subasas dan Prinsip-prinsip	1	1	100%	100%	0	0	0	100%	100%	
Total Realisasi Kinerja (Rp) per Program							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Realisasi Kinerja (Rp) per Sub-Program							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Realisasi Kinerja (Rp) per Sub-Sub-Program							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pemeriksaan terhadap ketercapaian kinerja</p> <p>Pemeriksaan terhadap pencapaian kinerja</p> <p>Terdapat penyimpangan pelaksanaan kegiatan</p> <p>Terdapat penyimpangan pelaksanaan kegiatan</p> <p>Terdapat penyimpangan pelaksanaan kegiatan</p>														

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan dalam Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022, memuat pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Rencana Strategi, bahwa program pembangunan di masing-masing bidang harus dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan, maka penting penjabaran setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Bengkalis, dilingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022. Pada tahun 2022 ada beberapa kali mengalami pergeseran pada beberapa Sub Kegiatan namun tidak mengurangi pagu OPD.

Berdasarkan pagu DPA Pergeseran Tahun 2022, berikut Sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu, yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 7.959.308.328,- menjadi Rp. 8.870.211.537,- perlu penambahan pagu sebesar Rp. 910.903.209 penambahan tersebut untuk pembayaran kekurangan gaji dan TPP ;
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan semula Rp. 130.456.000,- bertambah menjadi Rp. 150.079.000,- penambahan pagu sebesar Rp. 19.623.000,-, penambahan digunakan untuk menambah paket makan minum pertemuan luar daerah Full Day.
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan semula Rp. 133.816.000 bertambah menjadi Rp. 162.472.000,- penambahan pagu sebesar Rp. 28.656.000,-, penambahan pada perjalanan dinas Bimtek.
4. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor semula Rp. 147.979.700 bertambah menjadi Rp. 168.082.000,- penambahan pagu sebesar Rp. 20.102.300,-, digunakan untuk menambah peralatan dan perlengkapan kantor.
5. Penyediaan Bahan Logistik semula Rp. 114.890.000 bertambah menjadi sebesar Rp. 214.750.000,- penambahan pagu sebesar Rp. 99.860.000,-, digunakan menambah untuk makan minum rapat.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD semula Rp. 855.852.000,- bertambah menjadi Rp. 1.052.974.000,- penambahan pagu sebesar Rp. 197.122.000,-.

7. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 2 Unit semula Rp. 0 menjadi Rp. 660.000.000,- untuk kendaraan dinas Irban.
8. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 4 unit semula Rp. 0 menjadi Rp. 760.000.000,-, digunakan untuk kendaraan dinas operasional.
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya semula sebesar Rp. 522.289.000 bertambah menjadi Rp. 822.289.000,-, penambahan sebesar Rp.300.000.000,- untuk keperluan pembelian sarana dan prasaran gedung kantor.
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik semula Rp. 185.896.673,- bertambah menjadi Rp. 360.896.673,- penambahan sebesar Rp. 175.000.000, digunakan untuk penambahan daya dan memperbaiki instalasi listrik ;
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya semula Rp. 558.612.000 penambahan menjadi Rp. 758.612.000,- penambahan Rp. 200.000.000,- digunakan untuk rehab gedung kantor.
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya semula Rp. 107.332.000 bertambah menjadi Rp. 113.732.000,- penambahan sebesar Rp. 6.400.000,-. Digunakan untuk perawatan Alat kantor dan Rumah Tangga.
13. Kerjasama Pengawasan Internal semula Rp. 618.267.000 bertambah menjadi Rp. 646.706.000 penambahan sebesar Rp. 28.439.000, untuk Makan Minum Rapat.
14. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah semula Rp. 621.922.000 bertambah menjadi Rp. 834.880.000,- penambahan sebesar Rp. 212.958.000,-, digunakan untuk Fasilitas dan Pemenuhan SPIP.

Dari beberapa Sub Kegiatan yang mengalami penambahan ada beberapa Sub Kegiatan yang dikurangi pagunya, yaitu :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah semula Rp. 1.061.427.000,- berkurang menjadi Rp. 601.367.000,-, pengurangan tersebut digunakan untuk penambahan pembelian Kendaraan Dinas Jabatan dan kendaraan dinas Operasional.
2. Reviu Laporan Kinerja semula Rp. 574.223.000 berkurang menjadi Rp. 347.076.000,- pengurangan tersebut digunakan untuk penambahan pembelian Kendaraan Dinas Jabatan dan kendaraan dinas Operasional.
3. Pengawasan Desa semula Rp. 1.141.894.000 berkurang menjadi Rp. 476.327.000,- pengurangan tersebut digunakan untuk penambahan pembelian Kendaraan Dinas Jabatan dan kendaraan dinas Operasional.

4. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah semula Rp. 280.934.000,- berkurang menjadi Rp. 208.314.000,- pengurangan tersebut digunakan untuk penambahan pembelian Kendaraan Dinas Jabatan dan kendaraan dinas Operasional.
5. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu semula Rp. 653.884.000 berkurang menjadi Rp. 326.004.000,- pengurangan tersebut digunakan untuk penambahan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor.
6. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas semula Rp. 128.750.000,- berkurang menjadi Rp. 98.360.000,- pengurangan tersebut digunakan untuk penambahan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022

OPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah perubahan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp).	Pagu Setelah Perubahan (Rp.)	Selisih (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Kapabilitas APIP Rasio APIP		Level 3 30%	Level 3 30%	12.638.159.301	14.723.157.810				14.440.298.653
6.01.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP		100%	100%	265.726.200	265.726.200	-			292.298.820
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Lima Tahunan/Tahunan APIP	Kabupaten Bengkulu	6 Dokumen	6 Dokumen	158.916.100	158.916.100	-		6 Dokumen	174.807.710
		Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko		1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan/ Kinerja Pengawasan APIP	Kabupaten Bengkulu	5 Laporan	5 Laporan	106.810.100	106.810.100	-		5 Laporan	117.491.110
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Penghasilan APIP		100%	100%	7.959.308.328	8.849.585.537	890.277.209			8.755.239.161
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur yang Memperoleh Gaji dan Tunjangan Pengawasan	Kabupaten Bengkulu	50 Orang	50 Orang	7.959.308.328	8.849.585.537	890.277.209		1 Tahun	8.755.239.161
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Tenaga Pengamanan Aset Kantor		100%	100%	134.400.000	134.400.000	-			134.400.000
6.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Harian Lepas Jasa Keamanan Kantor	Kabupaten Bengkulu	7 Orang	6 Orang	134.400.000	134.400.000	-		7 Orang	134.400.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparat Pengawasan Tersertifikasi/Terlatih dan Rasio APIP		70%	70%	895.193.000	926.014.000	30.821.000			984.712.311
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparat Pengawasan Yang Tersertifikasi	Kabupaten Bengkulu	28 Orang	28 Orang	630.921.000	587.123.000	(43.798.000)		28 Orang	694.013.100
		Jumlah Aparat Pengawasan yang Mengikuti Pengembangan Profesi		35 Orang	35 Orang					35 Orang	
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peraturan dan Perundang-Undangan	Kabupaten Bengkulu	150 Orang	150 Orang	130.456.000	153.579.000	23.123.000		150 Orang	143.501.600
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Bengkulu	20 Orang	20 Orang	133.816.000	185.312.000	51.496.000		20 Orang	147.197.600
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP		100%	100%	1.496.001.700	1.763.400.000	267.398.300			1.540.441.870
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kabupaten Bengkulu	11 Item	11 Item	53.064.000	53.064.000	-		11 Item	58.370.400
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kabupaten Bengkulu	60 Item	60 Item	147.979.700	168.082.000	20.102.300		60 Item	162.777.670
		Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor		30 Item	30 Item					30 Item	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk kebutuhan Rapat dan Kegiatan Pengawasan	Kabupaten Bengkulu	1500 Box	1500 Box	114.890.000	214.750.000	99.860.000		1500 Box	126.379.000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Publikasi Penunjang Pengawasan	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	180.016.000	180.016.000	-		12 Bulan	198.017.600
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Pengawasan		22 Item	22 Item					22 Item	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Pengawasan	Kabupaten Bengkulu	20 Media	20 Media	48.600.000	48.600.000	-		20 Media	53.460.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Kabupaten Bengkulu	170 Kali	1 Kali	855.852.000	1.003.288.000	147.436.000		170 Kali	941.437.200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Media Informasi Pengawasan	Kabupaten Bengkulu	1 Aplikasi	1 Aplikasi	95.600.000	95.600.000	-			
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP		100%	100%	615.995.000	1.102.957.000	486.962.000			1.334.517.900
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan	Kabupaten Bengkulu	-	2 Unit	-	137.184.000	137.184.000			
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	-	4 Unit	-	-	-		1 Unit	760.000.000
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Meubelair Penunjang Pengawasan	Kabupaten Bengkulu	15 Unit	15 Unit	93.706.000	93.706.000	-			
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pengawasan	Kabupaten Bengkulu	6 Item	6 Item	522.289.000	872.067.000	349.778.000		6 Item	574.517.900
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP		100%		360.291.073	535.291.073	175.000.000			396.320.191
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Surat Menyurat Penunjang Pengawasan	Kabupaten Bengkulu	1800 Surat	1800 Surat	134.000.000	134.000.000	-		1800 Surat	147.400.000
		Jumlah Tenaga Harian Lepas Aministrasi Kantor		5 Orang	5 Orang					5 Orang	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Infrastruktur Jaringan Interne/ Air/ Listrik Penunjang Pengawasan	Kabupaten Bengkulu	12 Bulan	12 Bulan	185.896.673	360.896.673	175.000.000		12 Bulan	204.486.340
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor	Kabupaten Bengkulu	2 Orang	2 Orang	40.394.400	40.394.400	-		2 Orang	44.433.840
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP		100%	100%	911.244.000	1.145.784.000	234.450.000			1.002.368.400
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Servis dan Pembayaran Pajak Kendaraan Jabatan/Operasional Bagi APIP	Kabupaten Bengkulu	9 Unit	9 Unit	245.300.000	245.300.000	-		9 Unit	269.830.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkulu	1 Unit	1 Unit	558.612.000	773.112.000	214.500.000		1 Unit	614.473.200
		Jumlah Tenaga Harian Lepas Jasa Kebersihan Kantor		5 Orang	5 Orang					5 Orang	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Alat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kabupaten Bengkulu	7 Jenis	7 Jenis	107.332.000	127.372.000	20.040.000		5 Jenis	118.065.200
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini BPK Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda		WTP BB		4.926.329.000	3.369.774.000	(1.556.555.000)			5.418.961.911
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP		BPK 65% Inspektorat 70%		3.991.511.000	2.762.126.000	(1.229.385.000)			4.390.662.111
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pengelolaan Pemerintahan dan Keuangan Daerah	Kabupaten Bengkulu	35 Laporan	35 Laporan	1.061.427.000	794.815.000	(266.612.000)		35 Laporan	1.167.569.700
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP pda Unit Kerja		46 Laporan	46 Laporan					46 Laporan	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Perencanaan Tahunan Pemda	Kabupaten Bengkulu	3 Laporan	3 Laporan	574.223.000	336.001.000	(238.222.000)		3 Laporan	631.645.300
		Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemda		4 Laporan	4 Laporan					4 Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu atas LPPD/ Laporan Kinerja Pemda		2 Laporan	2 Laporan					2 Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan DAK Pemda		20 Laporan	20 Laporan					20 Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Perencanaan 5 (Lima) Tahunan Pemda		2 Laporan	2 Laporan					2 Laporan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	83.710.000	83.710.000	-		1 Laporan	92.081.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten Bengkalis	11 Laporan	11 Laporan	1.141.894.000	393.242.000	(748.652.000)		11 Laporan	1.256.083.400
		Jumlah Hasil Pelaksanaan/ Pendampingan		1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Kerjasama Pengawasan	Kabupaten Bengkalis	12 Laporan	12 Laporan	618.267.000	642.368.000	24.101.000		12 Laporan	680.093.700
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	BPK 65% Inspektorat 70%	BPK 65% Inspektorat 70%	511.990.000	511.990.000	-		BPK 89% Inspektora t 75%	563.189.000
		Tersedianya Sistem Informasi/ Aplikasi		1 Aplikasi	1 Aplikasi					1 Aplikasi	
		Penyelenggaraan Acara Gelar Pengawasan		1 Kali	1 Kali					1 Kali	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		80%	80%	934.818.000	607.648.000	(327.170.000)			1.0218.299.800
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tetentu (TPKD)	Kabupaten Bengkalis	3 Laporan	3 Laporan	280.934.000	208.314.000	(72.620.000)		3 Laporan	309.027.400
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan/ Audit dengan Tujuan Tertentu/ Khusus/ Investigatif/ Penghitungan Kerugian Negara	Kabupaten Bengkalis	45 Laporan	45 Laporan	653.884.000	399.334.000	(254.550.000)		45 Laporan	719.272.400
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas SPIP Unit Kerja Maturitas MR Unit Kerja Pembangunan Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM		Level 3 Level 3 1 Unit Kerja		1.686.900.000	1.713.856.000	26.956.000			1.570.489.800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Maturitas SPIP Unit Kerja Level 3 Maturitas MR Unit Kerja Level 3 Pembangunan Unit Kerja yang dilakukan PMPRB		50% 50% 30%		1.686.900.000	1.713.856.000	165.526.000			1.570.489.800
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas atas Implementasi SPIP pada Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkalis	2 Laporan	2 Laporan	621.922.000	831.638.000	209.716.000		2 Laporan	684.114.200
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil PMPRB Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	259.182.000	120.612.000	-		1 Laporan	-
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring atas LHKPN dan LHKASN	Kabupaten Bengkalis	2 Laporan	2 Laporan	677.046.000	677.046.000	-		2 Laporan	744.750.600
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring atas Pelaporan Gratifikasi Oleh Penyelenggaraan Negara		1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring atas Pemenuhan Unsur-unsur MCP Pencegahan Korupsi Kabupaten Bengkalis		4 Laporan	4 Laporan					4 Laporan	
		Jumlah Laporan Sosialisasi/ Pemantauan Saber Pungli		6 Laporan	6 Laporan					6 Laporan	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	1 Laporan	128.750.000	84.560.000	(44.190.000)		1 Laporan	141.625.000
JUMLAH KESELURUHAN						19.251.388.301	19.806.787.810	555.399.509			21.429.750.364

BAB IV | PENUTUP

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan Perangkat Daerah yang diberi tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatab Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis melaksanakan fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan dan melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Dokumen Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 ini merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman dokumen yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis 2022.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis ini merupakan uraian singkat tentang penjabaran Rancangan Perubahanan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022, untuk mencapai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinatif, efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan artisipatif dalam rangka melaksanakan kegiatan guna mencapai sasaran program yang tertuang dalam Renja OPD.

Disamping itu pelaksanaan semua program. Kegiatan dan sub kegiatan baik harus mengacu kepada regulasi maupun kerangka anggaran. Pelaksanaan kegiatan masyarakat pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu unit kerja dan antar unit kerja, dengan memperhatikan tanggung jawab dan tugas yang melekat pada masing-masing unit kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis ini disusun sebagai bahan masukan pada rencana program dan kegiatan prioritas.

Bengkalis, 7 Juni 2022



INSPEKTUR DAERAH,

H. RADIUS AKIMA, S.Sos, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19710522 199101 1 001